



Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir

The Analysis of Performance Achievement for Rural Development in the Coastal Regions

Suroso^{1) a)*}

¹⁾Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati

^{a)}Jl. Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati. 59163. Jawa Tengah

*Email: surosopati321@gmail.com

Naskah Masuk: 30 Mei 2022

Naskah Revisi: 15 Juni 2022

Naskah Diterima: 29 Juni 2022

ABSTRACT

Managing the potential of coastal regions becomes a development challenge in order to improve human welfare. This research aimed to describe the performance achievement of rural development in the coastal regions in the study area. This research used a quantitative approach. It used secondary data. It used descriptive-comparative analyses. The descriptive result showed that all villages in the coastal areas have increased their rural development indexes (IDM) but only about 43% increased their status for the period 2017 to 2021. The comparative result proved that in 2021 the highest IDM is in Trangkil District and the lowest one was in Batangan District. The comparative test using Chi-Square (X^2) for the development performance has a counting value of 8,125 in significance of 10 %. It is greater than the table value so there is a significant difference in development performance among the coastal regions in the study area. Therefore, the region having the least development indexes (IDM) should become the priority in the regional development policy to alleviate disparity.

Keywords: coastal region, performance, rural development

ABSTRAK

Pengelolaan potensi kawasan pesisir untuk mewujudkan kesejahteraan menjadi tantangan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan capaian kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir di area studi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Data penelitian menggunakan data sekunder. Analisa data menggunakan analisis deskriptif-komparatif. Hasil analisis deskriptif menunjukkan semua desa kawasan pesisir di area studi mengalami peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) tetapi hanya sebagian desa mengalami peningkatan status tipologinya selama kurun waktu 2017 - 2021. Hasil analisis komparatif menunjukkan bahwa tahun 2021 capaian IDM kawasan pesisir tertinggi berada di kawasan Trangkil dan IDM terendah berada di kawasan Batangan. Uji komparatif dengan Chi kuadrat (X^2), kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir kurun waktu 2017-2021 memiliki nilai hitung chi kuadrat (X^2) 8,125 signifikan pada signifikansi 10%, lebih besar dari nilai tabel sehingga ada perbedaan signifikan capaian kinerja pembangunan pedesaan antar kawasan pesisir di area studi. Oleh karena itu, kawasan yang memiliki capaian IDM terendah perlu memperoleh prioritas dalam kebijakan pembangunan untuk mengeliminasi kesenjangan pembangunan.

Kata kunci: kawasan pesisir, kinerja, pembangunan pedesaan

PENDAHULUAN

Pengelolaan potensi kawasan pesisir demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan tantangan pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan pembangunan kawasan pesisir dengan memanfaatkan potensi dan menjaga pelestarian ekosistem kawasan pesisir sesuai amanat regulasi. Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 1 Ayat 19 menyatakan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya dalam rangka menjamin keberadaan, ketersediaan, dan

keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas nilai dan kekayaan keberagamannya. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan kawasan pesisir seharusnya dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga dapat bermanfaat bagi generasi masa kini dan generasi masa depan. Pengelolaan pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir seringkali menghadapi berbagai permasalahan. Kegiatan ekonomi yang pesat di wilayah pesisir untuk berbagai keperluan (industri, pelabuhan, tambak, dan pemukiman) menciptakan tekanan ekologis dan ekosistem kawasan pesisir (Effendi, 2009).

Rusaknya ekosistem kawasan pesisir menyebabkan kerusakan fisik dan biologis pesisir, yang berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) kawasan pesisir sehingga mengancam keberlanjutan sistem pesisir dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Ekosafitri et al., 2020). Ketidakseimbangan kerusakan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya pesisir termasuk penangkapan ikan yang berlebihan, kegiatan industri, kegiatan domestik, pertanian berdampak pada penurunan kualitas air untuk budidaya akibat pencemaran limbah di kawasan pesisir (Ariyanto, 2013). Degradasi habitat pesisir (perusakan mangrove dan terumbu karang), menyebabkan abrasi pantai dan masalah pembangunan kawasan pesisir (Effendi, 2009). Aktivitas manusia di kawasan pesisir seperti membuka ekosistem mangrove, pelindung pesisir alami untuk budidaya perikanan menyebabkan abrasi di kawasan pesisir sebagai akibat dari peralihan ekosistem mangrove, yang menyebabkan berkurangnya tangkapan ikan oleh nelayan kawasan pesisir (Redjeki, 2013).

Kawasan pesisir juga memiliki masalah akibat pemanasan global, seperti meningkatnya permukaan air laut dan kawasan pesisir yang semakin rentan (Joessidawati, 2016). Peristiwa banjir rob akibat naiknya permukaan air laut, diantaranya disebabkan oleh kerusakan kawasan pesisir. Banjir rob selanjutnya berdampak

pada kerusakan infrastruktur, terendahnya tambak dan mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kerusakan rumah permukiman masyarakat (Kumalasari, 2014).

Masalah pembangunan di kawasan pesisir lainnya adalah kemiskinan. Penelitian oleh Pramudyanto (2014) menyimpulkan adanya disparitas pendapatan antara nelayan skala kecil dan besar sehingga yang memperburuk kemiskinan nelayan skala kecil di pantai utara Jawa Tengah. Wilayah perairan pantai utara Jawa Tengah mulai mengalami kelebihan kapasitas karena jumlah perikanan tangkap yang besar. Kapasitas dimaksud mencakup jumlah nelayan, kapal penangkap ikan dan alat tangkap yang beroperasi di Laut Jawa (Pramudyanto, 2014). Kemiskinan sebagian nelayan di kawasan pesisir utara Jawa Tengah secara tidak langsung disebabkan oleh tindakan nelayan yang memanfaatkan terumbu karang sebagai bahan bangunan, yang berdampak pada berkurangnya jumlah ikan yang ditangkap dengan akibat rusaknya habitat penangkaran ikan di kawasan pesisir (Agunggunanto, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan kawasan pesisir dihadapkan pada berbagai permasalahan. Sebenarnya, kawasan pesisir juga memiliki berbagai potensi pembangunan untuk menopang kehidupan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kawasan pesisir di area studi (Kabupaten Pati), diantaranya adalah Kecamatan Juwana dan Tayu yang selama ini menjadi kawasan pusat pertumbuhan pembangunan yang dikenal dengan sebutan "Tatina" (Tayu, Pati, Juwana). Namun demikian, saat ini terindikasi dua kawasan tersebut memiliki capaian pembangunan pedesaan yang tertinggal dari kawasan pesisir lainnya. Hal ini sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dinamika capaian kinerja pembangunan pedesaan antar waktu pada kawasan pesisir di Kabupaten Pati. Kawasan pesisir dalam studi ini dibatasi 5 (lima) kawasan kecamatan dan pembangunan pedesaan adalah semua desa di kawasan kecamatan pada lokus studi.

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan Pesisir

Sampai saat ini belum ada definisi baku tentang wilayah pesisir, tetapi secara umum bahwa kawasan pesisir merupakan pertemuan antara ekosistem darat dan laut. Zona pesisir merupakan zona transisi antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan darat dan laut. Pendekatan terhadap batas-batas pesisir adalah sebagai berikut: (a) Pendekatan ekologis: kawasan pesisir adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses laut seperti gelombang, angin, pasang surut, dan intrusi air laut; dan wilayah laut yang masih dipengaruhi oleh proses teretorial daratan seperti sedimentasi dan pencemaran; dan (b) Pendekatan administratif: zona pesisir adalah wilayah yang dibatasi paling jauh di hulu sampai dengan 12 mil dari garis pantai untuk provinsi atau sepertiga untuk kabupaten/kota (Indrasari, 2020).

Pengertian dan batas kawasan pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah yang daratannya berbatasan dengan laut. Batas kawasan pesisir ke arah darat mencakup: (1) Ekologis: wilayah daratan yang dipengaruhi oleh proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan aliran air laut. (2) Administrasi: batas terluar dari hulu desa pesisir, atau jarak 2 km dari garis pantai. Sedangkan batas wilayah pesisir arah laut antara lain: (1) Ekologis: wilayah yang dipengaruhi oleh proses alam di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut, dan wilayah yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia di darat. (2) Administrasi: batas 4 mil dari pantai ke laut (Effendi, 2009).

Potensi Pembangunan Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir memiliki potensi tinggi untuk pembangunan. Harahab dalam Ekosafitri (2017) menyampaikan bahwa potensi kawasan pesisir meliputi: (1) Sumber daya terbarukan (hutan bakau, terumbu karang, padang lamun dan ganggang, sumber daya perikanan laut); dan (2) Sumber daya tak terbarukan yang terdiri dari sumber daya mineral dan geologi. Perencanaan dan pembangunan wilayah pesisir

perlu mendapat perhatian serius untuk mencegah kerusakan wilayah pesisir, misalnya dengan membuka lahan untuk budidaya intensif udang di tambak dengan penggundulan hutan mangrove seperti di pantai utara Jawa.

Dahuri dalam Effendi (2009) menyatakan bahwa terdapat satu atau lebih ekosistem dan sumber daya di kawasan pesisir dan laut. Ekosistem ini bisa bersifat alami atau buatan. Ekosistem alami kawasan pesisir dan laut meliputi terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun, pantai berpasir, muara sungai, laguna dan delta. Ekosistem buatan meliputi kolam, dataran pasang surut, kawasan wisata, kawasan industri, kawasan pertanian serta kawasan pemukiman.

Sumber daya pesisir dan laut meliputi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya terbarukan antara lain sumber daya ikan laut, mangrove, terumbu karang, alga dan bahan bioaktif. Sumber daya tidak terbarukan mencakup minyak, gas, mineral, pasir dan bahan tambang lainnya serta berbagai bentuk energi laut (gelombang, pasang surut, konversi energi panas dan angin laut) dan jasa lingkungan (fasilitas transportasi dan komunikasi, pengaturan iklim, keindahan alam dan penyerapan limbah).

Semua ekosistem dan sumber daya tersebut berpotensi menjadi aset ekonomi, ekologi, pendidikan dan penelitian, pertahanan, serta keamanan bagi suatu negara. Potensi ekonomi sumber daya pesisir dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di kawasan pesisir dan/atau kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya pesisir. Sektor kelautan ini meliputi sektor industri pengolahan yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut: (1) kegiatan penangkapan ikan; (2) kegiatan wisata bahari; (3) operasi pertambangan dan energi; (4) operasi transportasi; (5) kegiatan industri kelautan; dan (6) kegiatan konstruksi kelautan. Potensi ekologis sumberdaya pesisir dapat dimaknai sebagai peran garis pantai sebagai pengatur keseimbangan lingkungan, keseimbangan iklim, dan keseimbangan panas bumi. Potensi pertahanan dan keamanan wilayah

pesisir dapat didefinisikan sebagai peran pesisir dalam menjaga kedaulatan negara, terutama pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain. Selanjutnya, potensi pendidikan dan penelitian di wilayah pesisir dapat dipahami wilayah pesisir berfungsi sebagai wahana kegiatan pembelajaran dan penelitian untuk mendukung pembangunan kawasan.

Pengelolaan Pembangunan Kawasan Pesisir

Terdapat beberapa model pengelolaan pesisir. Menurut Indrasari (2020), pengelolaan potensi wilayah pesisir menjadi bermanfaat bagi generasi sekarang dan masa depan, yang lazim diterapkan, terdapat 4 model. Pertama, pengelolaan potensi pesisir model tradisional. Model pengelolaan ini diterapkan pada masyarakat dengan pengetahuan dan teknologi yang rendah, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah. Komunitas tersebut masih mempertahankan kepercayaan, adat istiadat, dan budaya yang selama ini dilakukan.

Kedua, pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat. Model pengelolaan sumber daya ini dikembangkan oleh FAO dikenal *Community-Based Fisheries Management* (CBFM). Model pengelolaan sumber daya ini menjadikan pengetahuan publik dan kesadaran lingkungan sebagai dasar pengelolaan. CBFM merupakan model pengelolaan dimana kebijakan mengenai pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan berada di tangan masyarakat. CBFM dilakukan menggunakan tiga konsep yaitu: (a) pengakuan pemerintah dan masyarakat terhadap praktik pengelolaan yang ada secara turun temurun sebagai adat/budaya setempat; (b) Pemerintah dan masyarakat merevitalisasi adat dan budaya dalam pengelolaan sumber daya. Adat dan budaya ini mungkin telah hilang atau diubah, maka perlu dipulihkan atau dihidupkan kembali; dan (c) Pemerintah memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya kepada masyarakat.

Ketiga, pengelolaan potensi wilayah pesisir dengan model pengelolaan bersama atau *Co-management*. Model pengelolaan ini lebih memperhatikan kepentingan *stakeholders*, khususnya masyarakat. Dengan demikian,

pemerintah memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya. Terdapat 2 dua pendekatan manajemen yang digunakan dalam model ini: (a) manajemen berpusat pemerintahan. Pengelolaan dijamin oleh pemerintah dan masyarakat hanya diberitahu; dan (b) *Community-Based Management* atau pengelolaan berbasis komunitas. Model ini ada kontrol dan koordinasi yang dilakukan masyarakat. Pengelolaan bersama dapat dicapai dengan mengalihkan hak milik atas sumber daya kepada masyarakat.

Keempat, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem atau *Ecosystem-Based Fisheries Management*. Model ini disingkat EBFM merupakan model pengelolaan sumber daya perikanan yang bertujuan memanfaatkan hasil ekosistem laut untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yang beragam dengan kepentingan generasi mendatang. Rencana pengelolaan berbasis ekosistem ini perlu diselaraskan dengan strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk melindungi proses ekologi, keanekaragaman hayati laut, dan kelangsungan hidup sumber daya hayati laut. Singkatnya, pendekatan pengelolaan EBFM bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem.

Pengelolaan pembangunan pesisir dan kelautan harus berpedoman pada prinsip-prinsip berkelanjutan (Nugroho & Dahuri, 2012), meliputi: (1) komponen biotik dan abiotik di kawasan pesisir membentuk suatu ekosistem, ekologi yang kompleks karena faktor fisiologis (ekologis) yang beragam rentan berubah yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan bencana alam; (2) kawasan pesisir memiliki banyak keunggulan ekologis serta keunggulan lokasi, yang biasa digunakan untuk tujuan pembangunan seperti budidaya, perikanan, pariwisata, serta industri atau pemukiman manusia; (3) kawasan pesisir seringkali memiliki lebih dari satu kelompok masyarakat dengan keterampilan atau keahlian dan minat kerja yang berbeda seperti sebagai nelayan, pembudidaya tambak, pembudidaya rumput laut, wisatawan dan bekerja di industri dan kerajinan; (4) Secara ekologi dan ekonomi,

pemanfaatan monokultur pesisir sangat rentan terhadap perubahan internal dan eksternal yang berujung pada kegagalan usaha, misalnya *deforestasi* mangrove sebagai tambak; (5) Kawasan pesisir dan laut pada umumnya merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan pesisir dan laut memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang serius oleh pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan kawasan pesisir yang berkelanjutan memerlukan pengelolaan pesisir yang terintegrasi/terpadu. Pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan pendekatan yang sesuai meliputi: (1) pendekatan ekologis; (2) pendekatan ekonomi; (3) pendekatan sosio-politik; (4) pendekatan perilaku dan kultur. Pendekatan ekologis menekankan pada kelestarian kawasan sebagai suatu kesatuan ekosistem. Pendekatan ekonomi fokus pada kawasan sebagai wadah aktivitas ekonomi. Pendekatan sosial politis menekankan pada aspek penguasaan kawasan. Pendekatan ini melihat kawasan sebagai sarana produksi dan mengakumulasi kekuatan. Sementara, pendekatan perilaku dan kultur menekankan pada hubungan kawasan dengan masyarakat yang menghuni kawasan tersebut (Stefano, 2017).

Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir

Desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Marliana, 2017). Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa merupakan pembangunan dengan berbagai entitasnya yang berlangsung

untuk menopang kemaslahatan bersama bagi masyarakat desa

Adapun tujuan pembangunan desa adalah: (1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas kewenangan kabupaten; (2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan; (3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat; (4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan; (5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah; (6) Meningkatkan ekonomi kawasan bagi kesejahteraan masyarakat serta mengeliminasi kesenjangan antar kawasan; dan (7) Pembangunan perdesaan (Fatmawati, 2020).

Pembangunan desa seharusnya mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat desa. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi merupakan beberapa bentuk pembangunan kawasan pedesaan. Penguatan pembangunan pedesaan tidak cukup didorong oleh kapitalisasi akumulasi modal yang mengalir ke pedesaan, tetapi harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Memberdayakan masyarakat pedesaan adalah bagian dari upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kapasitas, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan sesuai dengan sifat masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Yusuf dkk, 2016).

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir sangat penting untuk peningkatan kesejahteraan di kawasan tersebut. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan pesisir mencapai 22% dari total populasi. Wilayah yang luas menunjukkan bahwa kawasan pesisir merupakan salah satu pusat

kegiatan pembangunan yang penting bagi masyarakat, terutama perikanan laut, perdagangan, budidaya, transportasi, pariwisata, pengeboran minyak, gas, dll. (Jamal, 2019). Masyarakat pesisir dan masyarakat yang bergantung hidupnya pada ekosistem laut berdasarkan hukum adat perlu melakukan pengelolaan lingkungan pesisir dan laut secara terpadu. Pengelolaan lingkungan terpadu memengaruhi pengelolaan yang efektif untuk menyeimbangkan penggunaan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Penggunaan sumberdaya dan bentuk manajemen perlu dilakukan lebih adaptif dan dapat diterapkan bagi masyarakat untuk berkembang. Hal tersebut diantaranya melalui pengelolaan pembangunan pesisir berkelanjutan (Dewi, 2018). Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pola kegiatan pembangunan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana dalam peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan lingkungan umat manusia dengan menjaga akses dan kesempatan pada generasi yang akan datang untuk memanfaatkannya. Kegiatan pembangunan memiliki arah (1) berkelanjutan secara ekonomi, kegiatan pembangunan menekankan pada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), penggunaan sumber daya, serta investasi secara efisien; (2) berkelanjutan secara ekologis, kegiatan pembangunan menekankan pada upaya mempertahankan kelestarian ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, serta konservasi sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati; (3) berkelanjutan secara sosial, kegiatan pembangunan menekankan pada upaya menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, keterpaduan sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan (Hidayat, 2016).

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menciptakan perbaikan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Tjarve & Zemite, 2016; Mensah & EnuKwesi, 2018). Stoddart (2011) menyatakan bahwa konsep keberlanjutan dalam pembangunan

didefinisikan sebagai alokasi sumber daya yang adil dan efisien antar generasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial dalam batas-batas ekosistem. Pertama, pembangunan sosial dianggap berkelanjutan (*social sustainability*) jika kebutuhan dasar seluruh penduduk terpenuhi; pemerataan pendapatan dan peluang usaha. Kedua, pembangunan ekonomi dikatakan berkelanjutan (*economic sustainability*) apabila daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa secara berkelanjutan. Ketiga, pembangunan ekologis dianggap berkelanjutan (*ecological sustainability*) jika basis sumber daya alam yang tersedia dipertahankan secara stabil, tanpa eksploitasi berlebihan, sumber daya alam terbarukan, dan tidak membuang limbah di luar batas *carrying capacity* lingkungan yang menyebabkan kondisi tercemar, serta penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbarui dibarengi dengan pengembangan bahan penggantinya secara memadai.

Pengukuran kinerja pembangunan pedesaan di Indonesia termasuk kawasan pesisir menggunakan paradigma pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (Suroso, 2020). Pengukuran pembangunan desa berdasarkan Peraturan Kemendes Nomor 2 Tahun 2016 menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) yang berisi 3 komponen yakni Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks ketahanan lingkungan (IKL).

Capaian pembangunan desa berupa nilai Indeks Desa Membangun (IDM) menentukan status tipologi desa yang bersangkutan. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Regulasi tersebut menyatakan bahwa tipologi eksistensi desa dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu: (1) desa sangat tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) $< 0,491$; (2) desa tertinggal dengan Indeks Desa Membangun (IDM) $> 0,491$ dan $< 0,599$; (3) desa berkembang dengan Indeks Desa Membangun (IDM) $> 0,599$ dan $< 0,707$; (4) desa maju dengan indeks $> 0,707$ dan $< 0,815$; dan (5) desa mandiri dengan indeks $> 0,815$.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki fokus capaian kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir. Sebelumnya telah disebutkan bahwa pedesaan dalam studi ini bermakna sekelompok desa pada suatu kawasan (kecamatan). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif.

Penelitian dilakukan di lima kecamatan yang terletak di kawasan pesisir Kabupaten Pati, meliputi: (1) Kecamatan Batangan; (2) Kecamatan Juwana; (3) Kecamatan Trangkil; (4) Kecamatan Tayu; dan (5) Kecamatan Dukuhseti. Lokasi penelitian tersebut merepresentasikan tiga karakteristik kawasan pesisir. Kecamatan Batangan dan Kecamatan Dukuhseti memiliki karakteristik kawasan pinggiran ujung timur dan utara. Kecamatan Juwana dan Kecamatan Tayu memiliki karakteristik kawasan pertumbuhan cepat pembangunan. Kecamatan Trangkil memiliki karakteristik posisi tengah kawasan pesisir.

Data penelitian menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dokumen instansi terkait. Data capaian pembangunan desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM). Dinamika capaian pembangunan desa menggunakan data antar waktu pada 5 kawasan pesisir atau 5 kecamatan yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan lautan.

Analisis data menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Pertama, analisis deskriptif capaian kinerja pembangunan kawasan pesisir menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) antar waktu untuk mengetahui dinamika perkembangan capaian kinerja setiap desa pada kawasan pesisir tersebut. Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 dikelompokkan dalam 5 klasifikasi yaitu: (1) desa sangat tertinggal, indeks < 0,491; (2) desa tertinggal dengan indeks, 0,491 < indeks < 0,599; (3) desa berkembang dengan indeks, 0,599 < indeks < 0,707; (4) desa maju dengan

indeks, > 0,707 < indeks < 0,815; dan (5) desa mandiri dengan indeks > 0,815. Indeks (IDM) dalam penyajian hasil dan pembahasan pada bagian tertentu diberikan kodifikasi: A untuk desa mandiri, B untuk desa maju, C untuk desa berkembang, D untuk desa tertinggal dan E untuk desa sangat tertinggal.

Kedua, analisis komparatif capaian kinerja pembangunan kawasan pesisir menggunakan perbandingan rerata nilai beda IDM kurun waktu tahun 2017 sampai 2021. Indeks (IDM) dinyatakan dalam rentang nilai 0 hingga 1. Untuk memudahkan proses analisis komparatif-test, nilai indeks (IDM) pada bagian tertentu disubstitusi menjadi nilai "Normalitas Skor" yang menggunakan rentang nilai 0-100. Relevan dengan rentang nilai tersebut, normalitas skor merupakan nilai konversi indeks dikalikan 100.

Komparasi uji beda kinerja capaian pembangunan desa antar kawasan pesisir menggunakan uji statistik Chi kuadrat (X²) yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(F_o - F_h)^2}{F_h}$$

X² = nilai chi kuadrat

F_o = nilai yang diobservasi

F_h = nilai yang diharapkan

Interprestasi nilai Chi Kuadrat (X²) adalah: (1) Jika nilai (x² hitung) lebih besar dari nilai (x² tabel) berarti terdapat perbedaan signifikan peningkatan kinerja pembangunan kawasan pesisir di area studi; dan (2) Apabila nilai (x² hitung) lebih kecil dari nilai (x² table) berarti tidak ada perbedaan signifikan peningkatan kinerja pembangunan kawasan pesisir di area studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan pesisir dalam studi ini meliputi 5 (lima) kecamatan, kawasan pesisir: (1) Kecamatan Batangan; (2) Kecamatan Juwana; (3) Kecamatan Trangkil; (4) Kecamatan Tayu; dan (5) Kecamatan Dukuhseti. Hasil dan pembahasan menyajikan: (a) analisis deskriptif capaian

pembangunan pedesaan tiap kawasan; dan (b) analisis komparatif capaian pembangunan pedesaan antar kawasan pesisir di area studi. Komparasi capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir diukur dengan rerata Indeks Desa Membangun (IDM) dari semua desa di kawasan lokus studi, tidak terbatas pada desa yang memiliki karakteristik tertentu.

Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Batangan

Kawasan pesisir Kecamatan Batangan meliputi 18 desa. Pertama, Desa Tlogomojo tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,545 masuk kategori desa tertinggal (D) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,642 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,097. Kedua, Desa Ngening tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,637 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,700 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,063. Ketiga, Desa Raci tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,622 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,780 masuk kategori Maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,158. Keempat, Desa Ketitangwetan tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,639 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,676 masuk kategori berkembang (c) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,037. Kelima, Desa Bumimulyo tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,636 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,700 masuk kategori berkembang (c) dengan peningkatan indeks sebesar 0,064. Keenam, Desa Jembangan tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,651 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,696 masuk kategori berkembang (c) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,045. Ketujuh, Desa Klayusiwalan tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,664 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,665 masuk kategori berkembang (c) dengan capaian kinerja

(peningkatan indeks) sebesar 0,001. Kedelapan, Desa Bulumulyo tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,668 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,697 masuk kategori berkembang (c) dengan peningkatan indeks sebesar 0,029. Kesembilan, Desa Sukoagung tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,621 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,690 masuk kategori berkembang (c) dengan peningkatan indeks sebesar 0,068. Kesepuluh, Desa Tompomulyo tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,597 masuk kategori desa tertinggal (D) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,672 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,075.

Agregat kawasan pesisir Kecamatan Batangan memiliki capaian pembangunan desa tahun 2017 yang ditunjukkan rerata Indeks Desa Membangun (IDM) dengan nilai 0,646. Dua desa kategori tertinggal (Tlogomojo dan Tompomulyo) dan 16 desa berkembang. Capaian pembangunan desa tahun 2021 rerata Indeks Desa Membangun (IDM) sebesar 0,697 dengan status 5 (lima) desa maju (Raci, Kuniran, Gunungsari, Batursari, dan Lengkong), dan 13 desa berkembang. Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami kenaikan rerata sebesar 0,051 kurun waktu tahun 2017 sampai 2021. Tujuh desa mengalami kenaikan status kategori dan 11 desa tidak mengalami kenaikan status, sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 1.

Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Juwana

Kawasan pesisir Kecamatan Juwana meliputi 29 desa. Pertama, Desa Sejomulyo tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,644 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,695 masuk kategori berkembang (C) dengan peningkatan indeks sebesar 0,050. Kedua, Desa Bringin tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,683 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,700 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,018. Ketiga, Desa Ketip tahun 2017

Tabel 1.
Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Batangan

No	Nama Desa	IDM 2017		IDM 2021		Perubahan (IDM)	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Tlogomojo	0,545	D	0,642	C	0,097	Naik
2	Ngening	0,637	C	0,700	C	0,063	Tetap
3	Raci	0,622	C	0,780	B	0,158	Naik
4	Ketitangwetan	0,639	C	0,676	C	0,037	Tetap
5	Bumimulyo	0,636	C	0,700	C	0,064	Tetap
6	Jembangan	0,651	C	0,696	C	0,045	Tetap
7	Klayusiwalan	0,664	C	0,665	C	0,001	Tetap
8	Bulumulyo	0,668	C	0,697	C	0,029	Tetap
9	Sukoagung	0,621	C	0,690	C	0,068	Tetap
10	Tompomulyo	0,597	D	0,672	C	0,075	Naik
11	Kuniran	0,707	C	0,730	B	0,023	Naik
12	Gunungsari	0,679	C	0,717	B	0,037	Naik
13	Kedalon	0,690	C	0,703	C	0,013	Tetap
14	Gajahkumpul	0,610	C	0,664	C	0,054	Tetap
15	Batursari	0,701	C	0,750	B	0,049	Naik
16	Lengkong	0,694	C	0,709	B	0,016	Naik
17	Mangunlegi	0,657	C	0,690	C	0,034	Tetap
18	Pecangaan	0,617	C	0,670	C	0,053	Tetap
	Total IDM	11,634		12,549		0,915	
	Rerata IDM	0,646		0,697		0,051	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

memiliki indeks sebesar 0,679 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,687 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,008. Keempat, Desa Pekuwon tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,621 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,689 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,068. Kelima, Desa Karang tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,633 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,654 masuk kategori berkembang (c) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,021.

Kawasan pesisir Kecamatan Juwana memiliki capaian kinerja pembangunan desa tahun 2017 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rerata nilai 0,667 dengan perincian status 2 desa kategori Maju (Doropayung dan Kauman) dan selebihnya 27

desa masuk kategori desa berkembang. Capaian pembangunan desa tahun 2021 yang ditunjukkan IDM, memiliki rerata nilai 0,715 dengan status 13 desa maju (kategori B), dan 16 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C). Indeks Desa Membangun (IDM) pada kawasan pesisir Kecamatan Juwana mengalami kenaikan rerata sebesar 0,048. Desa yang mengalami kenaikan status tipologi sebanyak 12 desa dan selebihnya, sebanyak 17 desa tidak mengalami kenaikan status. Capaian kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir Kecamatan Juwana ditunjukkan Tabel 2.

Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Trangkil

Kawasan pesisir Kecamatan Trangkil meliputi 16 desa. Pertama, Desa Kajar tahun 2017 memiliki indeks 0,726 masuk kategori desa maju (B) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,784 masuk kategori maju (B) dengan capaian

Tabel 2.
Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Juwana

No	Nama Desa	IDM 2017		IDM 2021		Perubahan (IDM)	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Sejomulyo	0,644	C	0,695	C	0,050	Tetap
2	Bringin	0,683	C	0,700	C	0,018	Tetap
3	Ketip	0,679	C	0,687	C	0,008	Tetap
4	Pekuwon	0,621	C	0,689	C	0,068	Tetap
5	Karang	0,633	C	0,654	C	0,021	Tetap
6	Karangrejo	0,705	C	0,697	C	-0,009	Tetap
7	Bumirejo	0,616	C	0,686	C	0,070	Tetap
8	Kedungpancing	0,622	C	0,714	B	0,092	Naik
9	Jepuro	0,702	C	0,714	B	0,012	Naik
10	Tluwah	0,697	C	0,702	C	0,006	Tetap
11	Doropayung	0,725	B	0,806	B	0,081	Tetap
12	Mintomulyo	0,682	C	0,720	B	0,037	Naik
13	Gadingrejo	0,682	C	0,723	B	0,041	Naik
14	Margomulyo	0,707	C	0,722	B	0,015	Naik
15	Langgenharjo	0,700	C	0,730	B	0,030	Naik
16	Genengmulyo	0,646	C	0,706	C	0,060	Tetap
17	Agungmulyo	0,661	C	0,670	C	0,009	Tetap
18	Bakaran Kulon	0,694	C	0,747	B	0,053	Naik
19	Bakaran Wetan	0,677	C	0,683	C	0,006	Tetap
20	Dukutalit	0,686	C	0,707	C	0,021	Tetap
21	Growong Kidul	0,644	C	0,702	C	0,057	Tetap
22	Growong Lor	0,681	C	0,711	B	0,030	Naik
23	Kauman	0,725	B	0,711	B	-0,015	Tetap
23	Pajeksan	0,607	C	0,821	A	0,213	Naik
25	Kudukeras	0,684	C	0,705	C	0,021	Tetap
26	Kebonsawahan	0,642	C	0,686	C	0,044	Tetap
27	Bajomulyo	0,614	C	0,787	B	0,172	Naik
28	Bendar	0,610	C	0,747	B	0,136	Naik
29	Trimulyo	0,686	C	0,721	B	0,034	Naik
	Total IDM	19,357		20,742		1,384	
	Rerata IDM	0,667		0,715		0,048	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,058. Kedua, Desa Trangkil tahun 2017 memiliki indeks 0,708 masuk kategori desa maju (B) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,803 masuk kategori maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,098. Ketiga, Desa Pasucen tahun 2017 memiliki indeks 0,650 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,815 masuk kategori maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,165. Keempat, Desa Tegalarjo tahun 2017 memiliki indeks

sebesar 0,643 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,701 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,059. Kelima, Desa Mojoagung tahun 2017 memiliki indeks 0,645 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,806 masuk kategori maju (B) dengan peningkatan indeks sebesar 0,162.

Agregat kawasan pesisir Kecamatan Trangkil memiliki capaian kinerja pembangunan desa tahun 2017 yang ditunjukkan

Tabel 3.
Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Trangkil

No	Nama Desa	IDM 2017		IDM 2021		Perubahan (IDM)	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Kajar	0,726	B	0,784	B	0,058	Tetap
2	Trangkil	0,708	B	0,803	B	0,095	Tetap
3	Pasucen	0,650	C	0,815	B	0,165	Naik
4	Tegalharjo	0,643	C	0,701	C	0,059	Tetap
5	Mojoagung	0,645	C	0,806	B	0,162	Naik
6	Ketanen	0,712	B	0,809	B	0,097	Tetap
7	Karanglegi	0,560	D	0,730	B	0,170	Naik
8	Karangwage	0,758	B	0,802	B	0,044	Naik
9	Kadilangu	0,662	C	0,805	B	0,143	Naik
10	Tlutup	0,645	C	0,789	B	0,144	Naik
11	Krandan	0,605	C	0,813	B	0,208	Naik
12	Kertomulyo	0,649	C	0,810	B	0,161	Naik
13	Rejoagung	0,669	C	0,802	B	0,133	Naik
14	Guyangan	0,642	C	0,806	B	0,164	Naik
15	Sambilawang	0,603	C	0,806	B	0,203	Naik
16	Asempapan	0,635	C	0,803	B	0,168	Naik
	Total IDM	10,510		12,684		2,174	
	Rerata IDM	0,657		0,793		0,136	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

Melalui Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rerata nilai 0,657. Terdapat 4 desa maju (kategori B), 11 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C) dan 1 desa kategori tertinggal (kategori D). Capaian pembangunan desa tahun 2021 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki rerata nilai 0,793 dengan status 15 desa maju (kategori B), dan 1 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C). Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami kenaikan rerata sebesar 0,136 untuk kurun waktu tahun 2017 sampai 2021. Desa yang mengalami kenaikan status sebanyak 12 desa dan selebihnya 4 desa stagnan, tidak mengalami kenaikan status. Capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir Kecamatan Trangkil ditunjukkan Tabel 3.

Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Tayu

Kawasan pesisir Kecamatan Tayu meliputi 21 desa. Pertama, Desa Pondowan tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,606 masuk ka-

tegori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,730 masuk kategori desa maju (B) dengan peningkatan indeks sebesar 0,124. Kedua, Desa Kedungsari tahun 2017 memiliki indeks 0,571 masuk kategori desa tertinggal (D) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,695 masuk kategori berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,123. Ketiga, Desa Margomulyo tahun 2017 memiliki indeks 0,667 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,762 masuk kategori desa maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,095. Keempat, Desa Pakis tahun 2017 memiliki indeks 0,661 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,769 masuk kategori desa maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,108.

Kawasan pesisir Kecamatan Tayu memiliki capaian kinerja pembangunan desa tahun 2017 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rerata nilai 0,690, status

status 7 desa Maju (kategori B), 13 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C) dan 1 desa kategori tertinggal (kategori D, Desa Kedungsari). Capaian pembangunan desa tahun 2021 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki rerata nilai 0,747 dengan status 14 desa maju (kategori B), dan 7 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C). Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami kenaikan rerata sebesar 0,057 untuk kurun waktu tahun 2017 sampai 2021. Desa yang mengalami kenaikan status kategorisasi sebanyak 8 desa dan 13 desa tidak mengalami kenaikan status. Capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir Kecamatan Tayu ditunjukkan Tabel 4.

Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Dukuhseti

Kawasan pesisir Kecamatan Dukuhseti meliputi 12 desa. Pertama, Desa Wedusan tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,599 masuk kategori desa tertinggal (D) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,653 masuk kategori desa berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,054. Kedua, Desa Dumpil tahun 2017 memiliki indeks 0,612 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,662 masuk kategori desa berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,050. Ketiga, Desa Ngagel tahun 2017 memiliki indeks sebesar 0,750 masuk kategori desa Maju

Tabel 4.
Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Tayu

No	Nama Desa	IDM 2017		IDM 2021		Perubahan (IDM)	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Pondowan	0,606	C	0,730	B	0,124	Naik
2	Kedungsari	0,572	D	0,695	C	0,123	Naik
3	Margomulyo	0,667	C	0,762	B	0,095	Naik
4	Pakis	0,661	C	0,769	B	0,108	Naik
5	Sendangrejo	0,657	C	0,793	B	0,137	Naik
6	Jepat Kidul	0,675	C	0,756	B	0,080	Naik
7	Tunggulsari	0,633	C	0,717	B	0,084	Naik
8	Jepat Lor	0,706	C	0,743	B	0,037	Naik
9	Tendas	0,724	B	0,791	B	0,067	Tetap
10	Keboromo	0,799	B	0,807	B	0,007	Tetap
11	Sambiroto	0,672	C	0,696	C	0,024	Tetap
12	Tayu Wetan	0,774	B	0,791	B	0,017	Tetap
13	Tayu Kulon	0,748	B	0,810	B	0,062	Tetap
14	Pundenrejo	0,758	B	0,785	B	0,027	Tetap
15	Kedungbang	0,638	C	0,690	C	0,052	Tetap
16	Bendokaton Kidul	0,642	C	0,701	C	0,059	Tetap
17	Purwokerto	0,735	B	0,774	B	0,038	Tetap
18	Bulungan	0,692	C	0,705	C	0,013	Tetap
19	Luwang	0,746	B	0,768	B	0,023	Tetap
20	Dororejo	0,690	C	0,696	C	0,006	Tetap
21	Kalikalong	0,692	C	0,707	C	0,015	Tetap
	Total IDM	14,487		15,685		1,198	
	Rerata IDM	0,690		0,747		0,057	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

(B) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,801 masuk kategori desa Maju (B) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,051. Keempat, Desa Bakalan tahun 2017 memiliki indeks 0,650 masuk kategori desa berkembang (C) dan tahun 2021 memiliki indeks 0,698 masuk kategori desa berkembang (C) dengan capaian kinerja (peningkatan indeks) sebesar 0,048.

Kawasan pesisir Kecamatan Dukuhseti memiliki capaian pembangunan desa tahun 2017 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan rerata nilai 0,657, dua desa kategori maju (B), 9 desa kategori desa berkembang (kategori C) dan 1 desa kategori tertinggal (kategori D, Desa Wedusan). Capaian pembangunan desa tahun 2021 yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki rerata nilai 0,711 dengan status 4 desa maju (kategori B), dan 8 desa masuk kategori desa berkembang (kategori C). Indeks Desa Membangun (IDM) mengalami kenaikan rerata 0,054 untuk kurun waktu tahun 2017 sampai 2021. Desa yang mengalami kenaikan status kategori sebanyak 3 desa dan 9 desa tidak mengalami kenaikan status kategorisasi. Capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir Kecamatan Dukuhseti ditunjukkan Tabel 5.

Analisis Komparatif Capaian Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir

Analisis komparatif ini menyajikan hasil analisis perbandingan capaian kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir di area studi. Pertama, Kawasan pesisir Kecamatan Batangan memiliki capaian IDM 0,646 tahun 2017 dan IDM 0,697 tahun 2021. Kenaikan kinerja pembangunan indeks sebesar 0,051 (skala nilai 0-1) setara dengan normalitas skor 5,1 (skala 0-100). Kedua, Kawasan pesisir Kecamatan Juwana memiliki capaian IDM 0,667 tahun 2017 dan IDM 0,715 tahun 2021. Kenaikan kinerja pembangunan indeks sebesar 0,048 (skala nilai 0-1) setara dengan normalitas skor 4,8 (skala 0-100). Ketiga, Kawasan pesisir Kecamatan Trangkil memiliki capaian IDM 0,657 tahun 2017 dan IDM 0,793 tahun 2021. Kenaikan kinerja pembangunan indeks sebesar 0,136 (skala nilai 0-1) setara dengan normalitas skor 13,6 (skala 0-100). Keempat, Kawasan pesisir Kecamatan Tayu memiliki capaian IDM 0,690 tahun 2017 dan IDM 0,747 tahun 2021. Kenaikan kinerja pembangunan indeks sebesar 0,057 (skala nilai 0-1) setara dengan normalitas skor 5,7 (skala 0-100). Kelima, Kawasan pesisir Kecamatan Dukuhseti memiliki capaian IDM

Tabel 5.
Capaian Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir Kecamatan Dukuhseti

No	Nama Desa	IDM 2017		IDM 2021		Perubahan (IDM)	
		Indeks	Kategori	Indeks	Kategori	Indeks	Kategori
1	Wedusan	0,599	D	0,653	C	0,054	Naik
2	Dumpil	0,612	C	0,662	C	0,050	Tetap
3	Ngagel	0,750	B	0,801	B	0,051	Tetap
4	Bakalan	0,650	C	0,698	C	0,048	Tetap
5	Kenanti	0,621	C	0,688	C	0,067	Tetap
6	Alasdowo	0,742	B	0,793	B	0,051	Tetap
7	Banyutowo	0,648	C	0,695	C	0,047	Tetap
8	Dukuhseti	0,664	C	0,730	B	0,065	Naik
9	Grogolan	0,612	C	0,691	C	0,078	Tetap
10	Kembang	0,669	C	0,696	C	0,028	Tetap
11	Tegalombo	0,665	C	0,702	C	0,037	Tetap
12	Puncel	0,647	C	0,720	B	0,073	Naik
	Total IDM	7,880		8,527		0,647	
	Rerata IDM	0,657		0,711		0,054	

Sumber: Pengolahan Data, 2022

0,657 tahun 2017 dan IDM 0,711 tahun 2021. Kenaikan kinerja pembangunan indeks sebesar 0,054 (skala nilai 0-1) setara dengan normalitas skor 5,4 (skala 0-100).

Komparasi antar kawasan pesisir, capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir tahun 2017 tertinggi berada di kawasan Tayu dengan rerata IDM sebesar 0,690. Namun tahun 2021 capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir tertinggi berada di kawasan Trangkil dengan rerata IDM sebesar 0,793. Kawasan pesisir Kecamatan Trangkil memiliki hasil kinerja pembangunan terbaik yang ditunjukkan dengan kenaikan rerata IDM sebesar 0,136 yang setara dengan normalitas skor kinerja pembangunan sebesar 13,6 (skala nilai 0-100).

Lima kawasan pesisir memiliki capaian kinerja pembangunan pedesaan yang bervariasi. Capaian kinerja pembangunan pedesaan dapat dinyatakan dengan IDM menggunakan basis nilai 0 sampai 1 atau normalitas skor dengan menggunakan basis nilai 0 sampai 100. Normalitas skor capaian kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir Kecamatan Batangan sebesar 5,1 rentang waktu tahun 2017 sampai 2021. Kawasan pesisir Juwana memiliki normalitas skor capaian kinerja pembangunan pedesaan sebesar 4,8. Kawasan pesisir Kecamatan Trangkil memiliki normalitas skor capaian kinerja pembangunan pedesaan sebesar 13,6. Kawasan pesisir Kecamatan Tayu memiliki normalitas skor capaian kinerja pembangunan pedesaan sebesar 5,7. Kawasan pesisir Kecamatan Dukuhseti memiliki normalitas skor kinerja pembangunan pedesaan sebesar 5,4.

Perbedaan normalitas skor capaian kinerja pembangunan pedesaan pada kawasan pesisir diuji tingkat signifikansinya dengan uji statistik chi kuadrat (X^2) yang dinyatakan dengan rumus:

$$X^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(Fo - Fh)^2}{Fh}$$

X^2 = nilai chi kuadrat

Fo = nilai yang diobservasi

Fh = nilai yang diharapkan

Nilai nominalitas skor kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir merupakan nilai riil yang diobservasi (Fo). Nilai yang diharapkan (Fh) adalah rerata nilai nominalitas skor kinerja pembangunan pedesaan kawasan pesisir. Guna menghitung uji chi kuadrat (X^2) diperlukan tabel penolong seperti ditunjukkan dalam Tabel 6.

Nilai hitung chi kuadrat (X^2) sebesar 8,125. Nilai tabel Chi kuadrat (X^2), dk 4 (derajat kebebasan, 5 kategori - 1) taraf signifikansi 5% sebesar 9,488 dan 7,779 untuk taraf signifikansi 10%. nilai hitung chi kuadrat (X^2) 8,125, lebih kecil dari nilai tabel Chi kuadrat (X^2) dengan taraf signifikansi 5 % (9,488) dan lebih besar dari nilai table Chi kuadrat (X^2) dengan taraf signifikansi 10% (7,779). Menggunakan taraf signifikansi 10% maka nilai hitung Chi kuadrat (X^2) lebih besar dari nilai tabel Chi kuadrat (X^2) yang berarti ada beda signifikan capaian kinerja pembangunan antar kawasan pesisir di area studi kurun waktu tahun 2017-2021.

Tabel 6.
Penghitungan Nilai Chi Kuadrat (X^2) Kinerja Pembangunan Pedesaan Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir	Fo	Fh	Fo - Fh	(Fo - Fh) ²	((Fo - Fh) ²) / Fh
Batangan	5,1	6,92	-1,82	3,312	0,479
Juwana	4,8	6,92	-2,12	4,494	0,649
Trangkil	13,6	6,92	6,68	44,622	6,448
Tayu	5,7	6,92	-1,22	1,488	0,215
Dukuhseti	5,4	6,92	-1,52	2,310	0,334
Jumlah	34,60	34,60			8,125

Sumber: Pengolahan Data, 2022

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan pedesaan kawasan pesisir di area studi berjumlah 96 desa, dan semua desa mengalami peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM). Ada 42 dari 96 desa (43,75%) mengalami kenaikan status tipologi desa dan sebanyak 54 desa (56,25%) tidak mengalami perubahan status tipologi desa antara tahun 2017 sampai 2021. Kinerja pembangunan pedesaan terbaik pada kawasan pesisir di area studi kurun waktu tersebut berada di Trangkil kenaikan capaian kinerja rerata IDM sebesar 0,136 atau setara dengan normalitas skor 13,6.

Tahun 2021 capaian pembangunan pedesaan kawasan pesisir yang ditunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) terbaik berada di kawasan Trangkil dengan rerata IDM sebesar (0,793) dan capaian IDM terendah berada di kawasan Batangan (0,697). Uji komparatif dengan Chi kuadrat (X^2) untuk kinerja pembangunan pedesaan pada kawasan pesisir kurun waktu 2017 sampai 2021 memiliki nilai hitung Chi kuadrat (X^2) sebesar 8,125. Nilai tabel Chi kuadrat (X^2) taraf signifikansi 5% sebesar 9,488 dan nilai tabel Chi kuadrat (X^2) taraf signifikansi 10% sebesar 7,779. Bila Chi kuadrat (X^2) menggunakan taraf signifikansi 10% maka nilai hitung Chi kuadrat (X^2) lebih besar dari nilai tabel Chi kuadrat (X^2) yang berarti ada perbedaan signifikan capaian kinerja pembangunan pedesaan antar kawasan pesisir di area studi.

Saran

Relevan dengan uraian diatas, kawasan Batangan yang memiliki capaian IDM terendah perlu memperoleh prioritas dalam kebijakan pembangunan untuk mereduksi potensi kesenjangan pembangunan. Strategi yang dapat diambil dalam kebijakan pembangunan daerah itu diantaranya masyarakat kawasan ini agar dikuatkan dan diberdayakan agar ikut serta dalam menikmati hasil pembangunan yang belakangan ini kawasan tersebut menjadi basis pengembangan industri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y. (2011). Analisis Kemiskinan dan Pendapatan Keluarga Nelayan Kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *J. Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 50-58.
- Ariyanto, S. (2013). Kondisi Terkini Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. *Media Akuakultur*, 8(2), 139-144.
- Dewi, A.A.I.A.A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. *Jurnal Penelitian Hukum, De Jure*, 18(2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>.
- Effendi, M. (2009). Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Kawasan Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan. *J. Kelautan*. 2(1), 81-86.
- Ekosafitri, K.H., Ernan Rustiadi, E. Yulianda, F. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 1 (2): 145-157.
- Fatmawati, Hakim, L., & Mappamiring, (2020). Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Journal of Public Policy and Management*, 1(1), 12-24.
- Hidayat, N. (2016). Rahan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pesisir Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Thesis. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.
- Indrasari, D. (2020). Identifikasi Masalah Dan Model Pengelolaan Wilayah Pesisir: Studi Kasus Provinsi Dki Jakarta, *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 5(01), 43 – 56.
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel Jurnal Hukum*, 2(1), 464-478.

- Joetidawati, M. I. (2016). Penilaian Kerentanan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Tuban Terhadap Amcaman Kerusakan. *J. Kelautan*, 9 (2), 188-198.
- Kumalasari, N. R. (2014). Kapasitas Adaptasi Terhadap Kerentanan dan Bencana Perubahan Iklim di Tambak Lorok Kelurahan Tanjung Mas Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 10(4), 476-487.
- Marliana, N. (2014). Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera, Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1), 140-153.
- Mensah, J., & Enu-Kwesi, F. (2018). The Implication of Environmental Sanitation Management in the Catchment area of Benya Lagoon, Ghana. *Journal of Integrative Environmental Sciences*, 16(1), 23-43, <https://doi.org/10.1080/1943815x.2018.1554591>.
- Nugroho, I. & Dahuri, R. (2012). Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Penerbit: LP3ES.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun. Jakarta: Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana, Kemendes.
- Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *J. Lingkar Widya-swara*, 1(4), 21-40.
- Redjeki, S. (2013). Komposisi dan Kelimpahan Ikan di Ekosistem Mangrove di Kedungmalang, Jepara. *J. Kelautan*, 18(1), 54-60.
- Stefano, A. (2017). Perencanaan Pengembangan Kawasan Pesisir. *Media Sains*, 10 (1), 97-104.
- Stoddart, H., Schneeberger, K., Dodds, F., Shaw, A., Bottero, M., Cornforth, J., & White, R. (2011). *A Pocket Guide to Sustainable Development Governance*. London: Stakeholder Forum.
- Suroso. (2020). Kebijakan Pembangunan Desa Tertinggal Berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) dan Potensi Lokal. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK*, 16(1), 47-61. <https://doi.org/10.33658/jl.v16i1.167>
- Tjarve, B., & Zemite, I. (2016). The Role of Cultural Activities in Community Development. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis*, 64(6), 2151-2160, <https://doi.org/10.11118/actaun201664062151>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Yusuf, Y., Putro, T.S., & Hamidi, W. (2016). Analisis Sosial Ekonomi Pembangunan Pedesaan di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 55-71.

BIODATA PENULIS

Suroso, lahir tanggal 19 Maret 1966 di Kabupaten Pati. Pendidikan Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bekerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati sebagai Peneliti Madya, Bidang Kebijakan Publik.